

## Implementasi Konsep Smart City Melalui Pengembangan Wilayah Kabupaten Simeulue

Idal Bahri\*<sup>1</sup>, Yunida Pangastuti<sup>1</sup>, Mohd. Isa T. Ibrahim<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Abulyatama, Aceh Besar, Indonesia

\*Email Korespondensi: [idal\\_wcc@yahoo.com](mailto:idal_wcc@yahoo.com)

Diterima 15 Agustus 2021; Disetujui 18 Oktober 2021; Dipublikasi 23 Oktober 2021

*Abstract: Regional development can give birth to new cities that can be implemented in the smart city concept which is a trend in Indonesia. This is a logical consequence of regional expansion based on the demands of local communities, it should be addressed wisely by directing and implementing a comprehensive, strategic and integrated planning concept that does not only rely on local strengths, but also considers the strengths of the surrounding area so that it is hoped that linkages will be created. functional between regions. Structuring a New City as a Smart City means optimizing land functions that aim to balance and create integration between urban areas which after the activity can guarantee and support environmental sustainability as a whole, improve the economy (improvement of economic conditions) and socially. welfare (social welfare). ) society in the future.*

**Keywords Smart city, and regional development.**

*Abstrak: Pengembangan wilayah dapat melahirkan kota-kota baru yang dapat diimplementasikan dalam konsep smart city yang sedang trend di Indonesia. Hal ini merupakan konsekuensi logis pemekaran wilayah yang berbasis pada tuntutan masyarakat lokal, sudah seharusnya disikapi secara bijak dengan mengarahkan dan menerapkan konsep perencanaan yang komprehensif, strategis dan terintegrasi. yang tidak hanya mengandalkan kekuatan lokal saja, tetapi juga mempertimbangkan kekuatan daerah sekitarnya sehingga diharapkan akan tercipta keterkaitan fungsional antar daerah. Penataan Kota Baru sebagai Kota Cerdas berarti optimalisasi fungsi lahan yang bertujuan untuk menyeimbangkan dan menciptakan keterpaduan antar kawasan perkotaan yang pada pasca kegiatan dapat menjamin dan mendukung kelestarian lingkungan secara menyeluruh, meningkatkan perekonomian (peningkatan kondisi ekonomi) dan sosial. kesejahteraan (kesejahteraan sosial). ) masyarakat di masa depan.*

**Kata Kunci Smart city, dan pengembangan wilayah.**

Beberapa strategi yang dapat digunakan dalam upaya perencanaan ekonomi wilayah dimana semua strategi tersebut bertujuan untuk mencapai pertumbuhan yang ideal bagi setiap daerah atau *region*. Salah satu strategi yang sering digunakan dan

yang telah dikenal dalam beberapa dekade terakhir yaitu strategi pusat pertumbuhan (*growth-pole strategy*). Strategi pusat pertumbuhan ini secara spesifik terfokus pada kegiatan investasi di lokasi-lokasi yang terbatas atau *region* (biasanya sebagai

bagian dari pertimbangan-pertimbangan usaha dalam memodifikasi struktur spasial dari sebuah *region*) dalam upaya mendorong aktifitas ekonomi, sehingga meningkatkan tingkat kemakmuran suatu daerah.

Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu akumulasi modal, pertumbuhan penduduk, dan kemajuan teknologi (*technological progress*). Perroux menyatakan bahwa kota merupakan suatu "tempat sentral" dan sekaligus merupakan kutub pertumbuhan. Pertumbuhan hanya terjadi di beberapa tempat, terutama daerah perkotaan, yang disebut pusat pertumbuhan dengan intensitas, yang berbeda.

Pengembangan wilayah yang dikonsentrasikan pada pusat-pusat pertumbuhan dengan industri padat modal akan merangsang pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya merangsang kegiatan pembangunan daerah. Kebijakan pemerintah dengan industri padat modal tersebut harus diikuti dengan pembangunan infrastruktur, transportasi, komunikasi, dan kelembagaan sosial, sehingga secara alami kondisi tersebut dapat meningkatkan daya tarik investasi. Implikasinya terhadap kegiatan ekonomi masyarakat yaitu di sisi produk yang dihasilkan dari wilayah pusat pertumbuhan akan digunakan oleh industri-industri lainnya yang berada di wilayah sekitarnya (*hinterland*) dan di ekspor ke luar wilayah sedangkan pada sisi lain memberikan peluang bagi produk-produk yang dihasilkan di sekitar wilayah pusat pertumbuhan untuk digunakan oleh industri di pusat pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diperlukan guna mempercepat perubahan struktur perekonomian daerah menuju perekonomian yang terus meningkat dan dinamis yang bercirikan industri yang kuat dan maju, pertanian yang

tangguh, serta memiliki basis pertumbuhan sektoral yang berpotensi besar. Pertumbuhan ekonomi yang diperlukan untuk menggerakkan dan memacu pembangunan di bidang lainnya serta sebagai kekuatan utama untuk meningkatkan pendapatan masyarakat (Nahrawi, 2005; 1).

Menurut Pebrina (2005;5) arah bagi kebijakan pembangunan yang ditempuh oleh Pemerintah Daerah dapat dilakukan dengan melihat spesialisasi keunggulan dari tiap wilayah atau kecamatan. Skala yang berbeda-beda dari masing-masing wilayah dalam sistem ekonomi, administrasi, dan pelayanan umum berakibat fungsi dari wilayah tersebut berbeda pula dalam pola, harmonisasi yang mampu saling menunjang wilayah satu dengan wilayah lainnya. Dalam rangka penyelarasan pertumbuhan ekonomi antar wilayah dalam suatu daerah dikemukakan konsep pendekatannya yaitu pengembangan kecamatan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Pendekatan dengan ruang lingkup kecamatan dimaksudkan agar pemerataan pembangunan antar wilayah dapat lebih merata dengan menemukannya spesialisasi dari masing-masing wilayah. Kecamatan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dimaksudkan untuk mengidentifikasi aktifitas-aktifitas ekonomi yang menjadi keunggulan dari suatu kecamatan sehingga dapat ditentukan kebijakan pembangunan yang paling sesuai dengan melihat spesialisasi keunggulannya.

Sementara Smart City merupakan isu global yang sedang booming hingga saat ini. Kata Smart City pertama kali dicetuskan oleh IBM pada tahun 1998 tetapi Smart City baru berkembang tahun 2000-an. Smart City terdiri dari enam dimensi yaitu Smart Economy, Smart Mobility, Smart Environment, Smart People, Smart Living dan Smart Governance.

Konsep dasar Smart City adalah mewujudkan sebuah komunitas/lingkungan bagi masyarakat yang efisien, berkelanjutan dan memberikan rasa aman. Konsep Smart City meliputi Pelayanan, Penyusunan kebijakan publik dan Perencanaan. (Patel & Padhya, 2014).

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah yang akan dikemukakan yaitu: Bagaimana pengembangan wilayah akan menimbulkan akselerasi ekonomi secara signifikan pada wilayah sekitarnya (hinter land) sehingga dapat menumbuhkan kota baru yang kemudian diimplementasikan dalam program smart city.

## KAJIAN PUSTAKA

### Konsep konsep pengembangan wilayah

Tingkat distribusi fasilitas pelayanan publik dan potensi lahan secara keseluruhan merupakan pendorong utama perluasan penggunaan lahan dan perubahan struktur internal kawasan kota. Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, munculnya konsep pembangunan wilayah tidak lepas dari berbagai teori tentang teori lokasi dan lokasi yang pada dasarnya merupakan upaya untuk mengoptimalkan fungsi lahan di suatu wilayah tertentu.

Untuk kondisi saat ini, dimensi lokasi tidak hanya terkait dengan masalah ruang, jarak, dan waktu, tetapi juga dimensi geografis (topografi, hidrologi) dan lanskap ekonomi sebagai variabel penting tambahan dalam kerangka teori pembangunan. Bahkan beberapa lokasi yang memiliki keunggulan komparatif seringkali dikaitkan sebagai keunggulan alam, misalnya kondisi iklim, tanah, air, dan topografi yang cenderung melibatkan input produksi, faktor kelembagaan dan kenikmatan

yang diinginkan untuk mendukung kenyamanan iklim investasi (Barlowe, 1986).

Dimensi lokasi dalam pembangunan daerah pada skala nasional, regional dan lokal harus diperhatikan secara matang agar tercipta efisiensi dan efektifitas dalam proses pelaksanaannya. Von Tunnen dalam Adisasmita (1982) memperkenalkan teori lokasi dengan mengembangkan hubungan antara lokasi yang berbeda secara spasial (lokasi spasial) dan pola penggunaan lahan (penggunaan lahan). Inti pembahasannya adalah tentang pemilihan lokasi dan peminatan di bidang pertanian. Von Tunnen melanjutkan, pola penggunaan lahan untuk setiap segmen kegiatan di suatu daerah akan mempengaruhi arah dan fungsi pengembangannya, sewa lahan akan semakin tinggi jika jarak dari pasar semakin kecil (dekat), begitu pula sebaliknya.

Dos Santos dengan teori ketergantungannya menyatakan bahwa hubungan antara negara dominan (pusat pelayanan utama) dan negara terbelakang (pusat pelayanan yang berada di bawahnya) menciptakan hubungan yang tidak seimbang, karena pembangunan pusat pelayanan utama sebenarnya dilakukan dengan biaya yang dikenakan di wilayah belakangnya melalui aktivitas pasar monopoli dalam hubungan perdagangan. Kondisi tersebut menggambarkan keunggulan service center utama yang mendominasi kegiatan pembangunan.

Dalam konteks pembangunan daerah, menurut teori ketergantungan Dos Santos di atas, negara dominan yang dianalogikan sebagai pusat pelayanan utama dan negara terbelakang yang dianalogikan dengan pusat pelayanan dibawahnya, secara lokal mempunyai hubungan yang tidak seimbang dalam perolehan pusat pelayanan. bagian pengembangan. Dampak yang ditimbulkan oleh teori ini dalam

konteks implementasinya dalam penataan ruang adalah terakumulasinya (aglomerasi) berbagai kegiatan pelayanan publik di ruang-ruang yang memiliki prioritas pembangunan yang dalam keseimbangan jangka panjang akan menimbulkan kekacauan dalam penataan ruang secara keseluruhan.

Berkaitan dengan pertumbuhan perkotaan, teori central place yang dikemukakan oleh Christaller dalam Adisasmita (1982) menyatakan bahwa setiap pusat pasar yang berkembang memiliki batasan pengaruh tertentu terhadap wilayah komplementernya, yang kemudian akan membentuk suatu level sentral vertikal. Pusat tingkat berikutnya akan memasok barang dan jasa pusat seperti perdagangan, perbankan, profesional, pendidikan, layanan pemerintah. Pasokan layanan ini bergantung pada ambang permintaan, yang merupakan tingkat permintaan minimum yang diperlukan untuk mendukung layanan; dan ruang lingkup permintaan (demand range), yaitu batas terluar (jarak) dari kawasan pasar yang ditempuh warga untuk memperoleh layanan sentral (Sumaatmadja, 1988).

Jika teori tempat terpusat tidak menjelaskan pola geografis secara bertahap dan bagaimana pola-pola tersebut berubah secara struktural, maka teori 'kutub pertumbuhan' yang dikenalkan oleh Francois Perroux (1955) menjelaskan pertumbuhan struktur ekonomi suatu daerah yang terjadi melalui kutub-kutub pertumbuhan yang ada di wilayah tersebut. Tiang pertumbuhan ini merupakan lokasi yang memiliki kegiatan Industri Pendorong (Industri Penggerak) dan Industri Unggulan (Industri Andalan). Interaksi antara industri ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi wilayah secara keseluruhan (Richardson, 1969).

Dalam konteks pembangunan daerah, teori

tiang pertumbuhan diharapkan dapat menjamin tingkat sebaran fasilitas pelayanan publik pada tiang-tiang yang telah ditentukan sesuai dengan potensi dan tingkat kesesuaian lahan yang ada, secara bertahap menciptakan interaksi sinergis baik dalam skala intraregion maupun antarwilayah sehingga itu dalam keseimbangan jangka panjang. tidak hanya kegiatan industri penggerak dan industri andalan dalam arti memproduksi barang dan jasa (faktor ekonomi) yang dapat mengalami pertumbuhan, tetapi juga kegiatan penunjang lainnya seperti perumahan, dapat memanfaatkan lahan yang ada untuk lebih dekat dengan lokasi tempat mereka bekerja. . Jika suatu tiang (kota) telah meluas, dan cenderung berkembang secara tidak berbentuk (tanpa bentuk), maka kota tersebut akan berkembang dengan keterkaitan antar kutub (pola konstelasi), yaitu kota yang membentuk kota satelit yang pada dasarnya merupakan perkembangan dari Konsep Garden City (Howard; 1898) yang bertujuan untuk menghidupkan kembali daerah pinggiran kota sebagai bagian dari kota.

Boudeville dalam Adisasmita (1982), berupaya mempertajam pendapat Perroux dan memasukkan unsur geografis dalam aspek keruangan. Boudeville mengklasifikasikan penataan ruang geografis ke dalam pembangunan dalam arti fungsional, sedangkan efek difusi pembangunan terhadap tata ruang geografis diterapkan dalam penataan ruang melalui jenis transformasi. Artinya pola tarikan (polarisasi) tidak dilihat sebagai ketergantungan daerah belakang pada daerah di depannya, tetapi bagaimana menciptakan keterkaitan fungsional yang sinergis antara keduanya

Menurut Hadjisarosa (1974), pembangunan daerah dimungkinkan oleh pertumbuhan modal yang bertumpu pada pengembangan sumber daya manusia

dan alam. Perkembangan kedua sumber daya ini berlangsung sedemikian rupa sehingga ' arus barang ' dianggap sebagai salah satu fenomena ekonomi yang paling dominan, karena merupakan bentuk fisik perdagangan antar daerah, antar pulau, atau antar negara melalui distribusi. jasa. Jasa distribusi merupakan kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan pembangunan fisik, terutama jika dilihat dari pengaruhnya dalam penentuan lokasi, pengelompokan kegiatan usaha di satu tempat, serta fungsinya dalam proses pembangunan suatu daerah.

Hadjisarosa berpendapat bahwa kriteria yang digunakan dalam menyatakan laju pertumbuhan suatu wilayah ditentukan oleh 'tingkat kemudahan' masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari. Hal ini dikarenakan berbagai kegiatan usaha masyarakat merupakan sumber pendapatan utama bagi pertumbuhan modal untuk pembangunan, dan tidak merata di berbagai tempat dalam suatu daerah. Semakin besar tingkat kenyamanan suatu tempat maka semakin kuat daya tariknya untuk menarik sumber daya bagi kegiatan ekonomi untuk datang ke tempat tersebut. Diantara kegiatan tersebut pelayanan distribusi merupakan unsur yang sangat penting, oleh karena itu kota pada umumnya merupakan pusat kegiatan usaha distribusi industri yang selanjutnya disebut Hadjisarosa sebagai "simpul pelayanan distribusi".

Dengan demikian agar pola ideal dalam pendistribusian dan pengalokasian aktifitas manusia pada suatu ruang tertentu dapat tetap bergerak dan tidak bertumpuk (menetap) pada pusat-pusat pelayanan utama, maka perlu mendeglomerasikan (menyebarkan) pusat-pusat pelayanan masyarakat sesuai kebutuhannya secara berimbang dan proporsional. Hal ini sejalan dengan Budihardjo

(1991) yang berupaya menciptakan keterpaduan antara dua wilayah yaitu pusat pelayanan utama (kota) dan pusat pelayanan yang ada dibawahnya (desa) agar keduanya dapat bersenyawa dan mempertahankan identitas serta eksistensinya masing-masing. Kesimpulannya bahwa konsep pengembangan wilayah dalam kaitannya dengan upaya pemanfaatan lahan secara optimal dalam perencanaan "Smart City sebagai kota baru" pada dasarnya bertujuan untuk menyeimbangkan sekaligus menciptakan keterpaduan antar wilayah perkotaan yang dalam pasca aktifitasnya kelak dapat menjamin dan menunjang kelestarian lahan (land conservation), peningkatan ekonomi (improvement of economic) dan kesejahteraan sosial (social welfare) masyarakat secara keseluruhan dimasa yang akan datang.

### **Implementasi Konsep Perencanaan Strategis dan Terpadu**

Paradigma perencanaan pembangunan dilaksanakan pada masa orde baru banyak mengacu pada teori prosedur perencanaan dan dimulai dengan tendensi kebutuhan/kepentingan pemerintah yang sentralistik. Konsep ini banyak berpihak pada perencanaan yang mono sektoral. Konsep perencanaan seperti ini dalam implementasinya ternyata tidak banyak menyentuh rasa kesejahteraan sosial masyarakat seperti tujuan hakiki dari perencanaan tersebut.

Dimasa yang akan datang, paradigma perencanaan pembangunan lebih difokuskan pada perencanaan multisektoral yang strategis dan terpadu dengan pendekatan politik yang lebih berpihak pada masyarakat.

Langkah awal untuk menanggulangi

tantangan yang dihadapi oleh pemerintah provinsi maupun lokal di Indonesia adalah berusaha untuk menjadi realistis (realistic) mengenai apa yang dapat dicapai melalui perencanaan dan campur tangan pemerintah dalam jangka pendek. Pengembangan kota-kota (town and city) terjadi pada umumnya adalah melalui keputusan-keputusan perorangan dan organisasi. Peran penting dari pihak swasta perlu untuk ditampung dan diakui.

Pendekatan realistis untuk memisahkan bidang-bidang yang memang harus diintervensi oleh pemerintah dan bidang-bidang yang memang sebaiknya dilepaskan ke pasar. Inti dari pendekatan strategis difokuskan pada keputusan-keputusan kunci yang dihadapi oleh pemerintah lokal. Apabila sumber dayanya terbatas, apa saja prioritasnya ?

Kesimpulan, pendekatan perencanaan yang lebih efektif bagi banyak pemerintah lokal di Indonesia dalam menghadapi keadaan yang seperti ini antara lain adalah :

- Berusaha realistis mengenai apa yang dapat dicapai dalam kurun jangka pendek.
- Identifikasi isu, permasalahan, ataupun investasi prasarana kunci yang perlu ditangani oleh pemerintah.
- Susun tujuan dan sasaran dengan jelas sehingga kemajuannya dapat diukur, jelas dan terbuka mengenai bagaimana perencanaan akan di implementasi,

#### **METODE PENELITIAN**

Lokasi penelitian ini mencakup wilayah yang ada di Kabupaten Simeulue Berdasarkan Undang-Undang Pembentukan Kabupaten luas wilayah daratan Kabupaten Simeulue beserta pulau-pulau kecil disekitarnya adalah 212.512 Ha, sedangkan

berdasarkan Digitasi Bappeda Kabupaten Simeulue luas wilayah Simeulue adalah 183.809 Ha. Berdasarkan penetapan UU 32/2004 Pasal 18 ayat (4), maka selain wilayah daratan yang akan menjadi lingkup wilayah perencanaan RTRWK Simeulue juga tercakup wilayah laut kewenangan pengelolaan (WLK) Kabupaten sejauh 4 (empat) mil-laut dari garis pangkal ke arah laut lepas. Wilayah laut kewenangan tersebut terdapat atau terletak di Samudera Indonesia dan Samudera Hindia

Namun penelitian difokuskan pada dua kecamatan yaitu kecamatan Simeulue Timur dan Teupah Selatan. Simeulue Timur yang mewakili kota Sinabang dengan ciri domin sebagai pusat pemerintahan dan pelayanan jasa perdagangan dan pelabuhan laut Sinabang sebagai satu-satunya jasa transportasi laut di kota Sinabang secara keseluruhan yang tidak hanya melayani jasa kepelabuhanan untuk kota Sinabang, tetapi juga daratan Aceh secara keseluruhan dan Kecamatan Teupah Selatan sebelah timurnya dengan gugusan pulau-pulau kecil tempat rencana budidaya perikanan.

Untuk mendukung analisis yang akan dilakukan, dibutuhkan data (sumber data sekunder) yang meliputi kecamatan Simulue Timur dan Teupah Selatan.. Kondisi aspek spasial yaitu peta-peta yang terdapat dalam Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Simeulue Tahun 2014-2034 dan didukung oleh data geografis lainnya dan data administrasi daerah penelitian serta data mengenai jumlah, tingkat penyebaran dan kepadatan serta pertumbuhan penduduk.

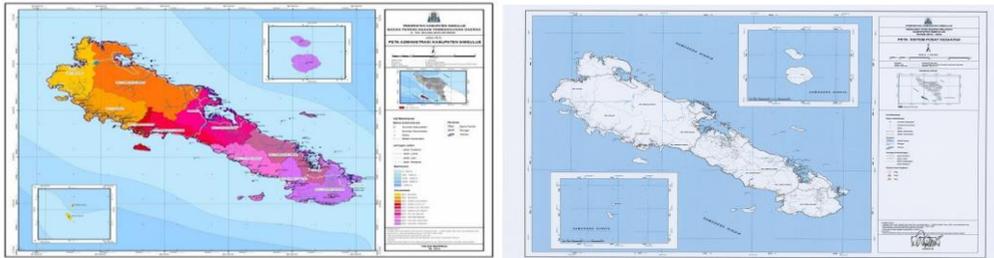
#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan Peta Rupa Bumi Indonesia skala 1 :

50.000 wilayah daratan Kabupaten Simeulue secara geografis terletak di sebelah Barat Provinsi Aceh dengan jarak 105 Mil laut dari Meulaboh Kabupaten Aceh Barat atau 85 Mil laut dari Tapak Tuan Kabupaten Aceh Selatan dan berada pada posisi

astronomi antara 02° 15' 03"- 02° 55' 04" Lintang Utara dan 95° 40' 15" - 96° 30' 45" Bujur Timur.

Peta Adminstrasi dan Peta Sistem Pusat Kegiatan Kabupaten Simeulue dapat dilihat pada Gambar 1 :

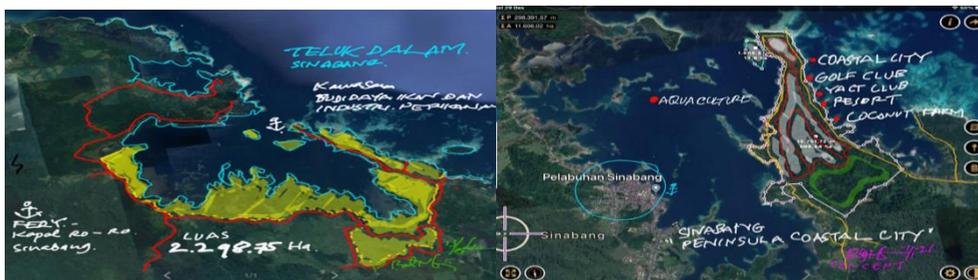


Gambar 1 Peta Administrasi & dan Sistem Pusat Kegiatan Kabupaten Simeulue

Kabupaten Simeulue dengan ibu kotanya Sinabang dibagi atas 10 wilayah kecamatan dengan total jumlah mukim 29 wilayah dan desa 138 wilayah. Kecamatan Simeulue Barat dengan Sibigo sebagai ibu kota kecamatan memiliki luas wilayah terbesar ± 44.607 ha (24,27%) dibagi dalam 14 wilayah administrasi desa, , sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah kecamatan Simeulue Cut ± 3.539 ha (1,93%) dengan wilayah administrasi desa

berjumlah 8 desa. Kecamatan ini merupakan kecamatan baru, pemekaran dari kecamatan Simeulue Tengah pada tahun 2012 bersama dengan kecamatan Teupah Tengah yang merupakan Pemekaran dari kecamatan Simeulue Timur.

Konsep rencana Kota Baru dengan prinsip Smart City di Teluk Sinabang dapat dilihat pada Gambar .2 berikut :



Gambar 2. Peta Konsep Rencana Smart City Teluk Sinabang

prinsip Smart City di Teupah Timur dapat dilihat pada Gambar 3

Adapun konsep rencana Kota Baru dengan

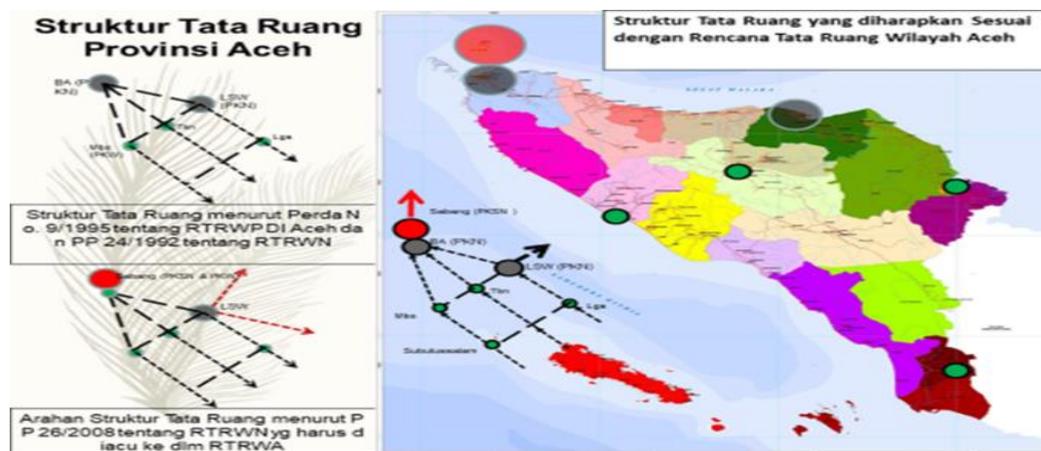


Gambar 3. Peta Konsep Rencana Smart City Teupah Selatan

Perkembangan konsep smart city telah menjadi trend di beberapa kabupaten / kota di Indonesia sebagai konsekuensi logis dari pemekaran wilayah sesuai dengan tuntutan masyarakat setempat. mengingat

kekuatan wilayah sekitarnya sehingga diharapkan tercipta keterkaitan fungsional antar wilayah.

Peta Simeulue dalam Struktur Tata Ruang Provinsi Aceh dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Peta Simeulue Dalam Struktur Tata Ruang Provinsi Aceh

Melalui perencanaan wilayah akan tumbuh Kota Baru, berarti optimalisasi fungsi lahan yang bertujuan untuk menyeimbangkan sekaligus menciptakan keterpaduan antar wilayah perkotaan yang dalam pasca aktifitasnya kelak dapat menjamin dan menunjang kelestarian lingkungan hidup secara keseluruhan, peningkatan ekonomi (improvement of economic condition) dan kesejahteraan sosial (social welfare) masyarakat dimasa yang akan datang.

Dengan adanya pembangunan untuk kedua lokasi smart city akan terjadi perubahan social yang direncanakan. Namun perlu diantisipasi dampak negativenya. Dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat setempat akibat dari perubahan penggunaan akan lahan yang ada saat ini dan rencana yang telah ditetapkan pada wilayah tersebut diantaranya adalah menurunnya daya dukung lingkungan alam akibat berubahnya hutan menjadi kawasan industri atau bahkan mata pencaharian penduduk /pekebun (kebun kelapa) dan petani

sawah ke sektor lainnya yang dalam jangka panjang akan dapat mempengaruhi kehidupan sosio-kultural penduduk setempat.

#### KESIMPULAN

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa proses dan pola alih fungsi lahan sebagai bagian dari upaya untuk menerapkan konsep smart city, mempunyai konsekuensi yang dapat menyebabkan karakteristik pekerjaan dan mata pencaharian penduduk setempat bergeser secara mendasar dari sektor perkebunan, pertanian, dan nelayan ke sektor jasa tenaga kerja kepelabuhanan dan sektor informal. Paradigma perencanaan pembangunan dillaksanakan pada masa orde baru banyak mengacu pada teori prosedur perencanaan dan dimulai dengan tendensi kebutuhan/ kepentingan pemerintah yang sentralistik. Konsep ini banyak berpihak pada perencanaan yang mono sektoral. Konsep perencanaan seperti ini dalam implementasinya ternyata tidak banyak menyentuh rasa kesejahteraan

sosial masyarakat seperti tujuan hakiki dari perencanaan tersebut.

Perencanaan dilakukan sesuai dengan potensi Kabupaten Simeulue yang mendukung konsep program smart city di kawasan kegiatan berbasis industry perikanan dan pariwisata. Bahan ini akan menjadi pedoman bagi pelaksanaan pembangunan Smart City di Simeulue yang akan dilaksanakan oleh *Investor* atau *Pemerintah* dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue sesuai dengan tugas dan fungsinya, melalui kreativitas, inovatif, sinergis dan berkesinambungan serta dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita,.,1982, Beberapa Dimensi Ekonomi Wilayah. Universitas Hasanuddin : Ujung Pandang.
- Barlowe, R., 1986, Land Resource Economics The Economies Of Real Estate. Four Edition. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.
- Branch, Melville C., 1996, Perencanaan Kota Komprehensif; Pengantar dan Penjelasan. Alih Bahasa
- Bambang Hari Wibisono, Penyunting Achmad Djunaedi. Gajah Mada University Press : Yogyakarta.
- Budihardjo, Eko, 1991, Arsitektur dan Kota di Indonesia. Penerbit Alumni, Bandung
- Christaller, W., 1933, Central Places in Southern Germany. Terjemahan oleh Baskin, E.W. 1966. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.
- Conyers, D., and Hills, P., 1984, An Introduction to Development Planning In The Third World. Chapter 1 – 4. John Willey and Sons; Chichester Andreas, 1976, Planning Teory. Pergamon Press : Oxford.
- Firman, T., 1996, Intisari Teori Pengembangan Wilayah. Lokakarya MTKLH PW, ITB : Bandung.
- Friedman, J., and Alonso, W. (Ed.), 1975, Regional Policy Reading in Theory and Aplication. The MIT Press : Cambridge, Massachusetts, and London, England.
- Hadjisarosa, P., 1974, Mekanisme Pengembangan Wilayah Satuan Wilayah Pengembangan (SWP). Departemen Pekerjaan Umum R.I. : Jakarta.
- Hirschman, A. O. ,1958, The Strategy of Economic Development. Yale University Press: New Haven.
- Ilhami, 1990, Strategi Pembangunan Perkotaan di Indonesia. Usaha Nasional : Surabaya.
- Patel, P. R., & Padhya, H. J. (2014). Review paper for Smart City, 1–6.
- Pebrina, Intan Yudistri. 2005. Analisis pusat pertumbuhan ekonomi pada tingkat kecamatan
- Sihombing, R.G, et.al, Strategi Pengembangan Wilayah-Wilayah Menjadi Pusat Pertumbuhan Berdasarkan Sektor Basis di Kabupaten Mimika, dalam Jurnal Kritis, Vol No. 4 Tahun 2020
- Sinar Grafika di Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan. Vol 4, No.1., Jurnal Kajian Ekonomi
- Perroux, F., 1955, Teori-Teori Lokasi dan Pengembangan Wilayah. Dirujuk oleh Rahardjo Adisasmita.1989. Bab VI hal.

29. Universitas Hasanuddin: Ujung  
Pandang.

Renyansih, 1989, Pengaturan Tata Ruang  
Daerah dan Kota. Pengaturan Bidang Ke-  
Cipta Karya Dep. P.U.. Direktorat  
Jendral Cipta Karya. Ujung Pandang, 9 –  
11 Pebruari, Hal. 4 – 5 .

Richardson, H. W. ,1969, Regional Economic:  
Location Theory, Urban Structure and  
Regional Change. Weidenfeld and  
Nicolson, London